



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:31** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materil Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, dll.** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Januari 2024 memberi kuasa kepada mohammad ahmadi, s.h., dkk Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Kamis** tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **08:25** WIB.

**Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
AP3 Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, dll.  
Pokok Permohonan : Pengujian Materil Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
No APPP : 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Permohonan bertanggal 3 Januari 2024	1 rangkap	Asli
7	Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2024 atas nama margaretha maria valentina lianywati batihalim, dkk 21 orang	1 rangkap	Asli, bermeterai
8	Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2024 atas nama Wulan Maharani Tilaar	1 rangkap	Asli, bermeterai
9	Daftar Alat Bukti P-1 dan P-2	1 rangkap	Asli
10	Alat Bukti P-1 dan P-2	1 rangkap	Asli, leges
11	Softcopy Permohonan bertanggal 3 Januari 2024	2 rangkap	word dan pdf

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.